

ANALISIS KELEMBAGAAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU PERKEBUNAN TEH RAKYAT

Nurman, Aceng Hidayat, Eva Anggraini

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Bandung
Program Studi Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Bogor 16680

*Email: nurman41@yahoo.co.id

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur tatakelola dan kelembagaan pengendalian hama terpadu perkebunan teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya dan menganalisis strategi pengelolaan kelembagaan yang ideal di Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) kondisi eksisting tatakelola dan kelembagaan pengendalian hama terpadu teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya penerapannya belum secara optimal. Tingkat partisipasi stakeholder yang rendah terutama segi monitoring dan evaluasi mengakibatkan implementasi penerapan 4 prinsip pengendalian hama terpadu oleh petani mulai ditinggalkan dan kembali lagi ke praktik sebelum mengikuti sekolah lapang pengendalian hama terpadu karena tidak memberikan dampak nyata terutama dari sisi harga pucuk teh yang disamaratakan dengan pucuk non pengendalian hama terpadu. Hal ini terjadi karena petani tidak mempunyai posisi tawar terhadap pihak luar walaupun secara produktivitas petani yang menerapkan pengendalian hama terpadu lebih unggul dibandingkan dengan petani non pengendalian hama terpadu, (2) Dan perumusan ulang strategi pengembangan struktur tatakelola dan kelembagaan pengendalian hama terpadu untuk keberlanjutan pengendalian hama terpadu dapat dikembangkan dari hulu ke hilir dan layanan pendukung berdasarkan visi yang jelas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani teh rakyat. *Redesain* ini disusun dengan harapan dapat berimplikasi pada aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan bagi petani sebagai pelaku utama dan pengusaha agribisnis di Kabupaten Tasikmalaya.

Kata kunci: Petani Teh, Kelembagaan, Pengendalian Hama Terpadu

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Kondisi *eksisting* kelembagaan pengendalian hama terpadu pasca pelatihan sekolah lapang pengendalian hama terpadu teh tahun 2005 kurang optimal pada usaha tani teh, penerapan

4 prinsip pengendalian hama terpadu sudah mulai ditinggalkan dan kembali lagi pada praktek-praktek sebelum sekolah lapang pengendalian hama terpadu, karena tidak memberikan dampak nyata terutama dari sisi harga dan pendapatan yang diterima oleh

petani.

- ◆ Sebagai akibat belum optimalnya kelembagaan, berimbas pada pendapatan petani. Pendapatan usaha tani teh relatif bervariasi, pendapatan total petani pengendalian hama terpadu sebesar Rp - 67,535 dan petani non pengendalian hama terpadu sebesar Rp -232,768. Pendapatan atas biaya tunai maupun pendapatan diperhitungkan untuk petani pengendalian hama terpadu jumlahnya lebih besar daripada petani non pengendalian hama terpadu sebesar Rp 270,644.00 berbanding Rp 269,771.00 dan pendapatan diperhitungkan Rp 1,204,961.12 berbanding Rp 680,601.05. Nilai R/C ratio terhadap biaya tunai sebesar 1,21 berbanding 1,30 dan R/C ratio atas biaya diperhitungkan 4,56 berbanding 2,35.
- ◆ *Redesain* strategi pengembangan kelembagaan pengendalian hama terpadu guna menjamin keberlanjutan penerapan pengendalian hama terpadu pada komoditas teh di Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan harapan dapat berimplikasi terhadap aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan bagi para petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis teh di Kabupaten Tasikmalaya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Kebijakan aspek ekonomi ini diambil menyangkut pengembangan harga dan pasar. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut: Meningkatkan posisi tawar petani dengan melakukan kerjasama dalam hal pemasaran hasil dan Peningkatan kualitas dan kuantitas serta skala ekonomi usaha tani.
- ◆ Kebijakan aspek sosial ini ditujukan untuk

pengembangan sumberdaya petani, agar memiliki kemampuan budidaya yang baik. Adapun kebijakan aspek sosial meliputi: Peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas petani dan pendamping lapangan dan membangun kembali jiwa dan semangat kegotongroyongan dalam hal pelaksanaan usaha tani teh melalui wadah kelembagaan kelompok tani.

- ◆ Kebijakan dari aspek lingkungan dilakukan agar usaha tani teh mempunyai multifier efek dan dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup. Adapun kebijakan aspek lingkungan adalah sebagai berikut:
 1. Mengembangkan sistem budidaya teh menggunakan konsep organic.
 2. Mengembangkan produk olahan teh berbasis organic.
 3. Mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari perubahan perilaku dalam hal pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara produsen teh terbesar di dunia. Pada tahun 2015, Indonesia menempati posisi ke enam dalam produksi teh, posisi ke lima dalam luas areal teh, dan posisi ke sembilan dalam produktivitas teh (Dirjenbun 2015). Areal teh terluas dimiliki oleh perkebunan teh rakyat, sayangnya tidak diikuti dengan produktivitas teh yang tinggi. Produktivitas perkebunan teh rakyat pada tahun 2016 masih sangat kecil yaitu kurang dari 1 ton teh kering/ha/th jauh dibawah produktivitas dari pelaku perkebunan teh nasional lainnya walaupun apabila dilihat perkembangan produktivitas

perkebunan rakyat selama 2009-2015 cenderung menunjukkan sedikit peningkatan.

Beberapa permasalahan utama sub sistem usaha tani antara lain 60% areal perkebunan merupakan tanaman tua/rusak sehingga produktivitas rendah serta kenaikan biaya produksi sebesar 13% per tahun yang lebih besar dari peningkatan harga jual hanya 4,5% per tahun, hal ini menyebabkan usaha perkebunan teh dalam kondisi merugi sejak tahun 2001 dan terjadinya penurunan areal yang tajam sebesar 16% dari tahun 2000 ke 2008 atau seluas 3.000 Ha/tahun. Penggunaan pestisida yang kurang bijaksana seringkali menimbulkan masalah kesehatan, pencemaran lingkungan dan gangguan keseimbangan ekologis. Oleh karena itu perhatian pada alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan semakin besar untuk menurunkan penggunaan pestisida sintetis. Pengendalian penyakit tumbuhan secara hayati merupakan salah satu komponen pengendalian hama terpadu (PHT) yang sesuai untuk menunjang pertanian berkelanjutan karena pengendalian ini lebih selektif (tidak merusak organisme yang berguna dan manusia) dan lebih berwawasan lingkungan. Pelaksanaan program pengendalian hama terpadu (PHT) merupakan langkah yang sangat strategis dalam kerangka tuntutan masyarakat dunia terhadap berbagai produk yang aman dikonsumsi, menjaga kelestarian lingkungan, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan yang memberikan manfaat antar waktu dan antar generasi. Kelembagaan PHT komoditi teh rakyat

adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang perkebunan teh rakyat. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas. Kelembagaan petani juga memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tatakelola dan kelembagaan PHT Perkebunan teh rakyat di tingkat Kabupaten dan *redesign* kelembagaan yang ideal di tingkat Kabupaten dan petani di Kabupaten Tasikmalaya.

II. SITUASI TERKINI

Kegiatan strategis untuk peningkatan kualitas SDM perkebunan teh rakyat, adalah melalui kegiatan sekolah lapang. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada tahun 1999 Direktorat Jenderal Perkebunan mengadakan kegiatan sekolah lapang pengendalian hama terpadu teh rakyat yang merupakan titik awal terbentuknya kelembagaan PHT teh rakyat.

Sasaran nasional dari pelaksanaan PHT adalah terlaksananya kegiatan PHT pada 202 kelompok di 24 provinsi di 95 kabupaten, yang salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Tujuan pelaksanaan kegiatan PHT : (1).

Tabel 1. Penentuan Populasi Pengamatan

No	Kecamatan	Petani PHT	Petani Non PHT	Total Petani
1	Taraju	90	505	595
2	Sodonghilir	144	589	730
3	Bojonggambir	229	1.331	1.560
	TOTAL	463	2.422	2.885

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani/kelompok tani tentang empat prinsip PHT yaitu : budidaya tanaman sehat, pelestarian dan pemanfaatan musuh alami,

Tabel 2. Matrik Tujuan, Sumber Data dan Metode Analisis Penelitian.

No	Tujuan Penelitian	Sumber Data dan Jumlah Sampel	Metode Analisis Data
1.	Menganalisa struktur tatakelola dan kelembagaan PHT Perkebunan teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya	Primer dan Sekunder : 1. 100 Responden petani teh 2. 16 Responden dari stakeholder dan kelembagaan 3. Data Sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur PHT 4. Sumber lain yang relevan dijadikan rujukan data untuk penelitian ini.	Analisis Deskriptif tatakola dan kelembagaan PHT di Kab. Tasikmalaya: 1. Struktur : • Aktor • Stakeholder • Situasi aksi • Arena aksi • Visi dan Misi • Aksi bersama 2. Infrastruktur : • Analisis konten dari peraturan perundang-undangan
2.	<i>Redesign</i> kelembagaan yang ideal di Kabupaten Tasikmalaya.	Primer dan Sekunder : 1. 100 Responden petani teh 2. 16 Responden dari stakeholder dan kelembagaan 3. Data Sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkur PHT 4. Sumber lain yang relevan dijadikan rujukan data untuk penelitian ini.	Analisis Strategi Tatakelola kelembagaan yang ideal : 1. Struktur : • Aktor • Stakeholder • Situasi aksi • Arena aksi • Visi dan Misi • Aksi bersama 2. Infrastruktur : • Analisis konten dari peraturan perundang-undangan

pengamatan rutin/berkala, dan petani menjadi ahli PHT. (2). Meningkatkan kepedulian petani/kelompok tani agar tahu, mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT dalam pengelolaan kebunnya. Kegiatan penerapan PHT teh rakyat merupakan salah satu kegiatan bersama antara pusat dan daerah, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran dari pemerintah daerah, dinas serta para pelaku pembangunan teh rakyat di tingkat lapangan. Kelembagaan PHT teh merupakan salah satu outcome dari kegiatan SLPHT yang bersumber dari anggaran Pusat dan Daerah.

Aktivitas budidaya teh rakyat dilakukan secara

sendiri-sendiri walaupun tergabung dalam wadah kelompok. Kelompok hanya sebatas identitas tetapi pada kenyataannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga petani dalam melakukan kegiatan budidaya hanya bersama sama anggota keluarga dan buruh tani.

Berdasarkan hasil penelitian biaya total rata-rata petani teh PHT di Kabupaten Tasikmalaya per hektar per bulan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,610,675. Sementara petani non PHT sebesar Rp 1,415,908. Komponen-komponen biaya tersebut adalah komponen biaya tunai yang dikeluarkan dan biaya yang diperhitungkan oleh petani teh PHT dan non PHT di Kabupaten

Tasikmalaya.

Penerimaan petani pada usaha tani teh rakyat merupakan nilai produksi yang diperoleh, dari perkalian antara jumlah produksi teh yang dihasilkan dengan harga produk sebelum dikurangi dengan biaya-biaya. Pemetikan pucuk teh oleh petani PHT dilakukan dengan interval 15-20 hari sekali sementara pemetikan pucuk teh oleh petani non PHT dilakukan dengan interval 30 hari sekali., sehingga penerimaan dihitung pada setiap panen. Harga pucuk teh stagnan selama 2 tahun sebesar Rp. 1800/kilogram. Produksi yang dihasilkan petani teh rata-rata mencapai 857,30 kilogram per bulan produksi per hektar, Sedangkan rata-rata produksi untuk petani teh non PHT mencapai 657,30 kilogram per bulan per hektar. Pendapatan total petani PHT sebesar Rp - 67,535 dan petani non PHT sebesar Rp -232,768, artinya kedua jenis usaha tani teh ini merugikan. Pendapatan atas biaya tunai maupun pendapatan diperhitungkan untuk petani PHT jumlahnya lebih besar dari pada petani non PHT. Pendapatan atas biaya tunai sebesar Rp 270,644.00 berbanding Rp 269,771.00 dan pendapatan diperhitungkan Rp 1,204,961.12 berbanding Rp 680,601.05.Selanjutnya nilai R/C ratio terhadap

biaya total untuk petani PHT sebesar 0,96 dan non PHT sebesar 0,84. Artinya nilai R/C ratio kurang dari satu atau dapat dikatakan tidak menguntungkan. Sebab ini menunjukkan setiap Rp 100 yang dikeluarkan akan menghasilkan Rp 96 untuk petani PHT dan Rp 84 untuk petani non PHT.

Mengingat kelembagaan PHT teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya dikelola dan di manfaatkan oleh beberapa pihak, maka pengelolaan dan pemanfaatan tersebut harus dibatasi oleh beberapa aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan aturan main yang berlaku terdiri dari dua level, yaitu *collective choice level* dan *operational level*. Aturan yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan berada pada *collective choice level* sedangkan pada tatanan operasional berada pada *operational level*. Levelling aturan main yang tersaji pada tabel 3.

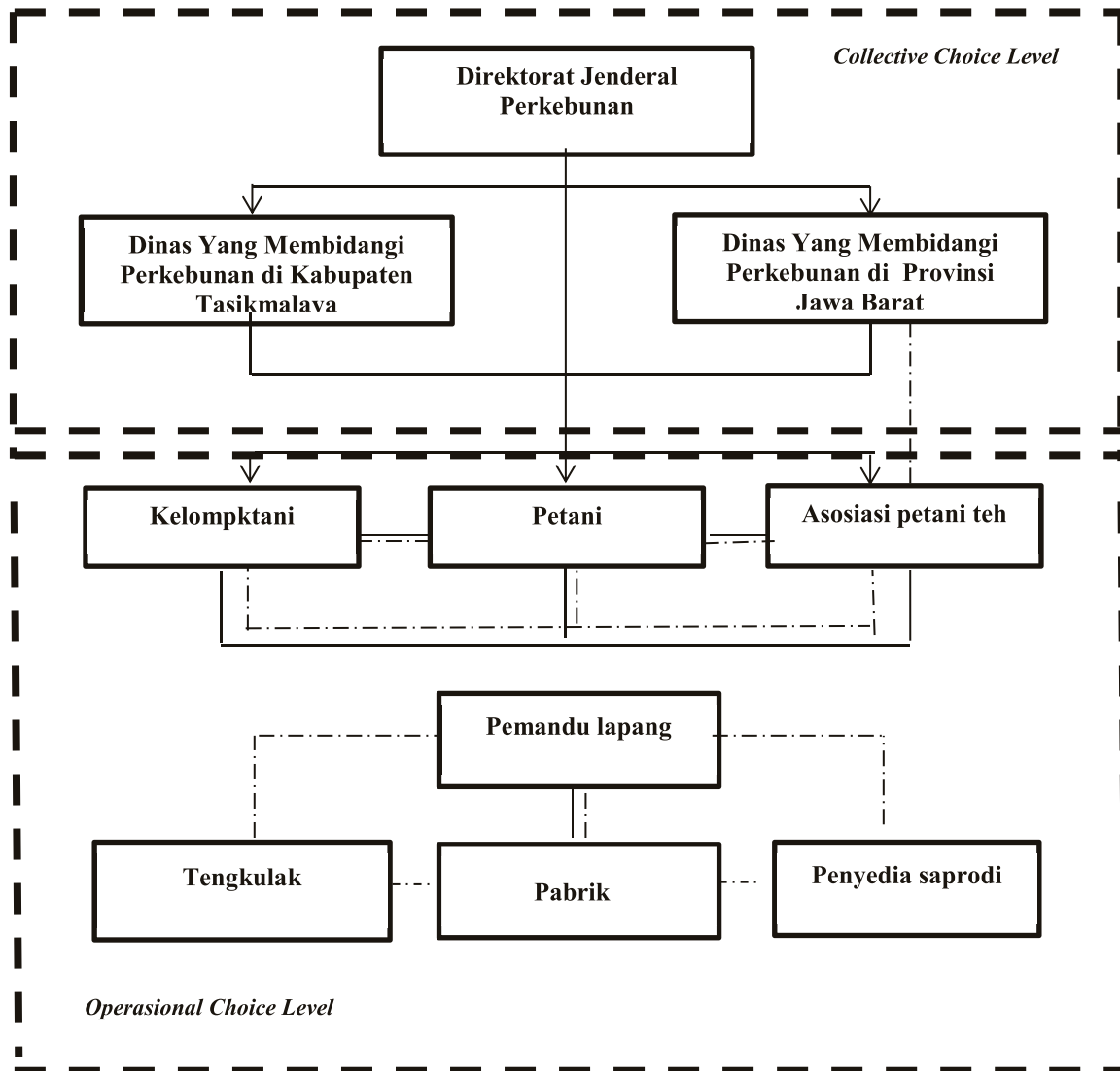
Dengan diketahuinya *levelling* pada kelembagaan PHT teh rakyat sehingga berikut gambaran untuk *levelling*:

Dengan tergambarkannya *levelling*, maka strukturnya pada gambar 1 :

Hasil analisis menunjukkan kelembagaan PHT teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya merupakan

Tabel 3. *Levelling* aturan main pada kelembagaan PHT teh di Kabupaten Tasikmalaya

No	Level peraturan	Hal yang diatur	Aktor
1	<i>Collective choice rules</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi diantara <i>stakeholder</i> yang terlibat • Pemantauan pengawasan dan monitoring 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirjenbun dan Disbun Prov Jabar • Dirjenbun dan Disbun Prov Jabar
2	<i>Operational choice ruler</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan • Pelatihan • Monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Disbun Prov, Dishutbun Kab, kelompktani, PPL, Pemandu lapang, pabrik teh, tengkulak, penyedia saprodi • Disbun Prov, Pemandu lapang • Dirjenbun, Disbun Prov



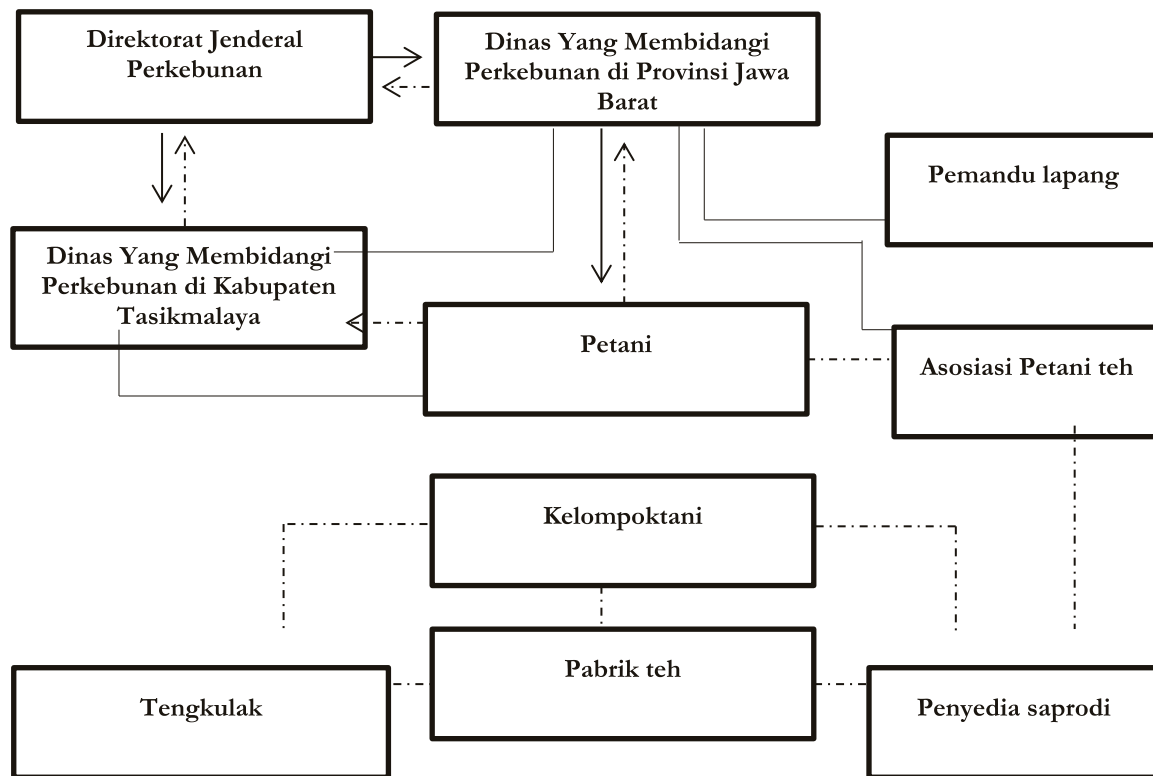
Gambar. *Leveling* kelembagaan PHT teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya

Keterangan :
 —> Perintah
 - - - - - Batasan
 Koordinasi

kelembagaan yang melibatkan banyak pihak. kelembagaan eksisting yang sudah terbentuk (*de facto*) dalam faktanya belum mampu menjalankan fungsinya dengan efektif. Kelembagaan yang sesuai dengan aturan main (*de jure*) tidak berjalan di lapangan. Dari hasil analisis tersebut berimbas pada pendapatan usaha tani teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya terutama dari segi harga pucuk teh yang tidak membedakan antara pucuk PHT dan Non PHT. Dari hasil pengamatan hal ini

disebabkan oleh tidak mempunyai nilai tawar baik petani ataupun kelompok tani terhadap pengumpul atau tengkulak, dimana tengkulak ini merupakan salah satu *actor* penting dalam pembangunan teh rakyat, namun mereka mempunyai tujuan yang berbeda dengan *stakeholder* lain yaitu sebagai pemburu keuntungan (*rent seeker*).

Kelompok tani sebagai wadah kelembagaan petani, pada kenyataannya masih belum mampu



Gambar. Struktur kelembagaan PHT teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya

Keterangan : —> Perintah
 Koordinasi

berjalan sebagaimana tujuan dan fungsinya. Tatakelola usaha teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya masih lemah, ditunjukkan dengan lemahnya posisi tawar (daya tarik) kelompok terhadap pihak luar (pemerintah, lembaga keuangan dan pasar).

Pada kelembagaan yang tergambar pada gambar 4 terjadi permasalahan para proses monitoring dan evaluasi serta komunikasi diantara dinas-dinas terkait sehingga menyebabkan hilangnya informasi yang seharusnya tersosialisasikan dan bisa menjalankan tupoksi dari masing masing dinas tersebut, jadi dalam hal ini faktor komunikasi dan evaluasi adalah faktor yang sangat bermasalah selain dari tidak adanya anggaran untuk melakukan monitong dan evaluasi pada kelembagaan PHT teh rakyat di kabupaten tasikmalaya.

Menurut Ostrom (1990) terdapat beberapa indikator kinerja institusi pengelolaan kelembagaan. Indikator ini telah digunakan untuk beberapa penelitian di dunia. Berikut adalah indikator-indikator tersebut yang dianalisis dari kondisi eksisting kelembagaan PHT teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya;

1. Batas-batas yang jelas

Batas-batas pada kelembagaan PHT teh rakyat ini sebenarnya sudah sangat jelas mengenai peran, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aktor dan *stakeholder*, namun pada pelaksanaannya kelembagaan dalam penerapan PHT teh rakyat masih belum bisa menggambarkan aturan yang seharusnya sehingga kelembagaan PHT teh rakyat ini masih belum optimal, terutama pada pemasaran pucuk teh yang seharusnya

pemungut (bandar/tengkulak) dalam menampung hasil petikan berdasarkan wilayah (zonasi) pabrikan tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai zonasi tersebut.

2. Kesesuaian aturan dengan kondisi lokal

Memiliki aturan-aturan yang tepat untuk kepentingan kelestarian sumberdaya, perlindungan ekonomi lokal, serta penguatan sistem sosial dan aturan-aturan tersebut mudah ditegakkan dan mudah diawasi, aturan disusun dan dikelola oleh pengguna sumberdaya, masyarakat mampu membuat aturan yang didasarkan atas pertimbangan saintifik, pengetahuan lokal, maupun kearifan lokal melalui mekanisme lembaga lokal. Pada kelembagaan PHT teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya, aspek kesesuaian dengan aturan lokal ada yang sudah ada dan tidak ada, begitupun secara tatakelola aturan tersebut ada yang sudah dijalankan, seperti untuk aspek gotong royong, sebenarnya sebelum berdirinya kelompok PHT, masyarakat sekitar sudah bersama-sama dalam pengelolaan kebun, mereka punya aturan seperti halnya dalam pelaksanaan pembukaan lahan, dan hal ini mempermudah pengembangan kelembagaan PHT teh rakyat dalam mengintroduksi kelembagaan ataupun teknologi yang akan ditransfer dari pemandu lapang/ penyuluh pertanian terhadap petani binaannya.

3. Adanya kelembagaan lokal yang berfungsi mengatur mekanisme pengelolaan.

Ada tiga sub indikator penting yaitu, pihak yang mungkin terdampak dari pemanfaatan/ pengelolaan, kesempatan bagi seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam mengubah aturan-aturan dan mekanisme partisipasi dari ke 3 sub indikator tersebut, semuanya sudah ada dan

tertera pada pedoman umum masing-masing *stakeholder* namun pada kenyataannya dilapangan saat ini ke 3 sub indikator masih belum terlaksana dengan baik, misalnya dengan adanya para tengkulak seharusnya kelompok tani memiliki keuntungan dengan adanya zonasi pemasaran pucuk the.

4. Pelaksana pengawasan

Kelembagaan yang baik memiliki instrumen dan mekanisme pengawasan sendiri dengan para pelaku pengawasan yang mendapat legitimasi. Pada kelembagaan PHT teh rakyat ini sudah sangat jelas secara aturan bahwa adanya pihak yang diawasi dan pihak yang mengawasi, namun pada kenyataannya hal ini belum berjalan secara optimal, misalnya di Kabupaten Tasikmalaya dengan tidak adanya alokasi anggaran dari pemerintah Kabupaten untuk pengawasan program ini, sehingga terjadinya keadaan yang kurang terkontrol dari para pemandu lapang/penyuluh nya, bahkan dari pihak Pemandu lapang nya sendiri mengaku kesulitan jika ada hal yang harus dikoordinasikan di tingkat lapangan karena kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri.

5. Berlakunya sanksi

Ukuran keberhasilan suatu aturan adalah tegaknya sanksi bagi para pelanggarnya, baik sanksi sosial, sanksi administratif, maupun sanksi ekonomi. Secara *de facto* aturan dan sanksi telah tertuang di dalam pedoman umum PHT, namun kenyataan di lapangan terutama di Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya berjalan dikarenakan masih terkait dengan pengawasan yang kurang.

6. Mekanisme penyelesaian konflik

Masyarakat memiliki mekanisme alternatif dalam penyelesaian konflik di luar mekanisme

formal. Sebenarnya sebelum adanya kelembagaan PHT, untuk penyelesaian konflik diantara anggota kelompok sudah berjalan, namun rasa keadilan dari penyelesaian konflik tersebut kadang terabaikan, sehingga petani berusaha membuat suatu manajemen konflik walau dalam berjalannya belum optimal karena masih adanya resistensi dari beberapa anggota kelompok.

7. Kuatnya pengakuan dari pemerintah.

Pengakuan dari pemerintah pada kelembagaan PHT ini sangat jelas dan kuat, dan sebenarnya program PHT ini sendiri digagas oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk menjalankan program ini juga didukung oleh infrastruktur berupa peraturan-peraturan, namun karena masalah koordinasi dan komunikasi di tingkat lapangan, sehingga program ini masih perlu banyak perbaikan agar menjadi suatu program dengan output suatu penguatan kelembagaan petani yang efektif.

8. Adanya ikatan atau jaringan dengan lembaga luar.

Jaringan dengan dunia luar yang dimaksud adalah baik jaringan antar komunitas (*bridging social capital*) maupun dengan di luar komunitas seperti perguruan tinggi, LSM, maupun swasta (*linking social capital*). Pada kelembagaan PHT sudah menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga lain bahkan lebih jauh membuat jaringan kelembagaan dari hulu sampai hilir dan lembaga keuangan, namun kenyataan karena anggaran untuk operasional dirasa minim maka hubungan antar lembaga ini belum mencerminkan suatu kelembagaan efektif yang bisa membangun kelembagaan pengembangan petani teh rakyat yang berbasis kelompok yang berkelanjutan.

9. Anggaran

Menurut Ostrom (1990) indikator kinerja institusi pengelolaan kelembagaan secara *generic* hanya ada 8 seperti yang telah dibahas diatas, namun dengan melihat kondisi di lokasi penelitian eksisting maka peneliti memasukan indikator anggaran agar bisa membuat *redesign* kelembagaan ideal.

Dalam melaksanakan kegiatan penerapan PHT teh rakyat pemandu lapang tahun 2016 mendapatkan insentif berupa honor dan biaya operasional selama 10 bulan dalam 1 (satu) tahun, yang sumber anggarannya berasal dari DPA SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melalui Balai Proteksi Tanaman Perkebunan

IV. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Analisis *Redesign* Kelembagaan PHT teh Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya

Analisis kelembagaan merupakan upaya mengurai permasalahan besar, dan berusaha menemukan inti persoalan dari setiap permasalahan. Analisis kelembagaan ini mempunyai objek analisis berupa suatu lembaga dengan segenap atributnya. Banyaknya *stakeholder* yang terlibat dalam penerapan PHT teh rakyat merupakan pencerminan kelembagaan yang kompleks. Berbagai kepentingan diantara *stakeholder* yang terlibat menimbulkan kepentingan yang berbeda-beda pula, dan tak jarang menimbulkan benturan kepentingan, padahal dalam mewujudkan PHT yang berkelanjutan diperlukan visi yang seragam diantara para *stakeholder*. Kelembagaan yang sudah terbentuk sebenarnya sudah memiliki dasar dan payung hukum yang jelas, namun implementasinya di lapangan masih belum optimal. Hal ini terjadi

Tabel 4 Analisis kelembagaan eksisting PHT teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator	Sub indikator	Eksisting			
			A	B	C	D
1.	Batas-batas yang Jelas (<i>clearly defined boundaries</i>)	Stakeholder yang terlibat	√	-	-	√
		Zonasi pemanfaatan	√	-	√	-
		Peran masing-masing <i>Stakeholder</i>	√	-	-	√
2.	Aturan terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan sesuai dengan kondisi lokal (<i>congruence between appropriation and provision rules and local conditions</i>)	Waktu yang diperbolehkan melakukan pemanfaatan	-	√	-	√
		Lokasi yang boleh dimanfaatkan	-	√	-	√
		Teknologi dan alat bahan yang digunakan	√	-	-	√
		Kegiatan yang diperbolehkan dalam pemanfaatan Pelestarian	√	-	-	√
3.	Pengaturan pilihan kolektif (<i>collective choice arrangements</i>)	Pihak yang mungkin terdampak dari pemanfaatan/pengelolaan	-	√	-	√
		Kesempatan bagi pihak terdampak untuk berpartisipasi dalam mengubah aturan-aturan operasional	√	-	-	√
		Mekanisme partisipasi	√	-	-	√
4.	Pengawasan (<i>monitoring</i>)	Pihak yang mengawasi	√	-	-	√
		Pihak yang diawasi	√	-	-	√
5.	Penerapan Sanksi (<i>graduated sanctions</i>)	Pihak yang memberikan Sanksi	√	-	-	√
		Sanksi yang diberlakukan	√	-	-	√
		Mekanisme penindakan	√	-	-	√
6.	Mekanisme Resolusi Konflik (<i>conflict-resolution mechanism</i>)	Pihak yang berwenang menangani konflik	√	-	-	√
		Mekanisme penanganan konflik	√	-	-	√
7.	Pengakuan minimal atas hak untuk mengelola (<i>minimal recognition of rights to organize</i>)	Wewenang/otoritas pemerintah atas hak kepemilikan sumberdaya	√	-	-	√
		Kesempatan masyarakat untuk merancang kelembagaan informal	√	-	-	√
8.	Kelembagaan lain yang melengkapi (<i>nested enterprises</i>)	Institusi lain yang Mendukung	√	-	-	√
		Hak, kewajiban, dan peran kelembagaan lain	√	-	-	√
9.	<i>Budgeting</i>	Anggaran untuk menjalankan kelembagaan	√	-	√	-

Sumber : Ostrom (1990)

karena beberapa hal, diantaranya adalah *stakeholder* masih belum memahami peran yang seharusnya dilakukan. *Stakeholder* hanya sebatas mengetahui saja namun tidak memahami perannya sehingga saat implemementasi banyak hal yang terlewatkan,

sehingga perannya menjadi tidak optimal. Contohnya yaitu petani teh rakyat, mereka hanya sebatas tahu jika peran mereka adalah untuk membudidayakan teh, namun belum memahami jika sebagai petani teh juga harus ikut menjaga

kelestarian lingkungan kebunnya, maka perlu kerjasama dari *stakeholder* lain dalam membantu petani agar memahami perannya. Jika mereka paham betul akan perannya, maka mereka akan melakukan usahatannya dengan baik dan sesuai prosedur.

Dalam penerapan PHT teh rakyat, koordinasi masih sebatas formalitas saja, belum dilakukan dengan sebaik mungkin. Koordinasi yang minim mengakibatkan pergerakan yang tidak terintegrasi satu sama lain, sehingga *stakeholder* yang terlibat terkesan bergerak secara sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ini yang menyebabkan visi yang tidak seragam diantara para *stakeholder*, sebagai contoh yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi antara balai proteksi tanaman perkebunan provinsi Jawa Barat dengan dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten Tasikmalaya, yang beranggapan bahwa balai proteksi tanaman perkebunan yang mempunyai anggaran maka dalam pelaksanaan kegiatan penerapan PHT tidak melibatkan dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten sehingga tidak terjadi kerjasama. Alangkah lebih baik jika para *stakeholder* melakukan koordinasi sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat terintegrasi satu sama lain. Sebagai langkah awal perlu dilakukan identifikasi untuk memperjelas dan mempertegas peranan maupun kepentingan masing-masing *stakeholder* untuk terwujudnya keberlanjutan penerapan PHT teh rakyat kemudian menggambarkannya dalam sebuah struktur kelembagaan sehingga dapat teridentifikasi peran dan kepentingan *stakeholder* tersebut.

Direktorat perlindungan perkebunan merupakan instansi yang berada di bawah Direktorat jenderal perkebunan yang dalam pelaksanaan program penerapan PHT mempunyai tugas dalam menyiapkan perumusan,

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan.

Sementara Balai proteksi tanaman perkebunan adalah unit pelaksana teknis dinas dari dinas perkebunan yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang proteksi tanaman perkebunan serta penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan proteksi tanaman perkebunan.

Dinas kehutanan dan perkebunan adalah dinas yang membidangi perkebunan yang di dalamnya terdapat bidang yang mengurus tentang perlindungan tanaman dalam penyusunan petunjuk teknis tentang penerapan PHT dilapangan, melakukan koordinasi pelaksanaan teknis perlindungan tanaman baik dengan dinas perkebunan provinsi, dirjenbun (direktorat perlindungan tanaman) maupun dengan petugas pelaksana tingkat lapangan (penyuluh dan pemandu lapang).

Brigade proteksi tanaman perkebunan (BPT) di bentuk sebagai kepanjangan tangan dari Balai proteksi tanaman perkebunan yang bekerjasama dengan Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten/Kota dengan tujuan sebagai pelaksana pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) di lapangan dalam menyediakan bahan dan alat (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk pengendalian OPT, menyediakan tenaga terampil dalam pengendalian OPT yang berasal dari petugas pengamat hama (POPT), Pemandu lapang dan petani petandu (petugas yang berasal dari petani pemilik dan penggarap yang sudah mendapatkan ilmu tentang budidaya, kepemanduan dan hama penyakit tanaman the).

Peran dan fungsi petugas dalam pelaksanaan pengendalian OPT adalah pelaksana pengamatan

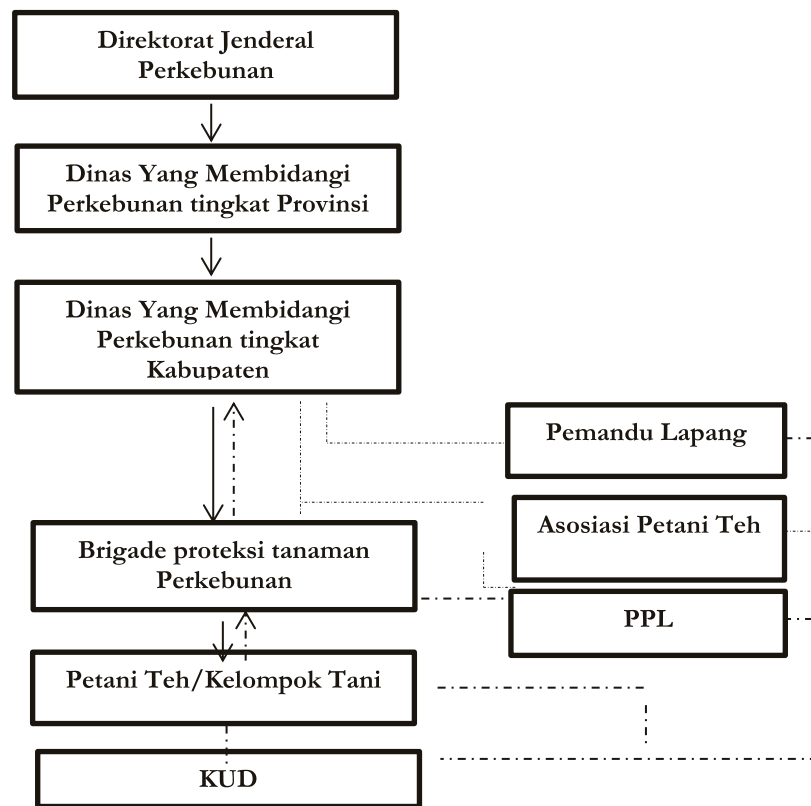
Tabel. Peran dan kepentingan *stakeholder* dalam penerapan PHT teh rakyat

No	Stakeholder	Peran dan kepentingan
1.	Direktorat Perlindungan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian OPT serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran 2) Menyiapkan Terms of reference (TOR) dan pedoman teknis 3) Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi
2.	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan tim pelaksana kegiatan penerapan PHT 2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Perkebunan dan Dinas kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan serta institusi terkait lainnya 3) Melakukan pengawalan, pembinaan, koordinasi dengan dinas dan institusi lainnya 4) Sosialisasi penerapan PHT bersama-sama dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan setempat 5) Membuat petunjuk pelaksanaan kegiatan penerapan PHT 6) Melakukan verifikasi CP/CL bersama dinas kabupaten/kota 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan PHT ke Dinas Perkebunan dan e Direktorat jenderal Perkebunan
3	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan tim pelaksana kegiatan penerapan PHT 2) Melakukan koordinasi dengan dinas perkebunan, balai proteksi tanaman perkebunan dan pihak terkait lainnya 3) Menyusun juknis penerapan PHT 4) Melakukan verifikasi dan penetapan CP/CL 5) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan monitoring evaluasi penerapan PHT 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan PHT ke dinas Provinsi dan direktorat Jenderal perkebunan
4.	Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menangani masalah pengendalian OPT dan mempunyai tenaga terampil bergerak secara cepat dan mempunyai sarana pengendalian yang memadai 2) Memimpin operasional gerakan pengendalian OPT yang timbul eksplosif 3) dan pengendalian daerah-daerah sumber serangan 4) Menyediakan, menyiapkan dan merencanakan pendistribusian bantuan sarana pengendalian berupa peralatan, pestisida, tenaga pelaksana dan perlengkapan lainnya apabila diperlukan 5) Melaksanakan inventarisir, perawatan dan perbaikan terhadap sarana pengendalian yang dimiliki BPT
5.	Pengamat hama/Pemandu lapang/Penyuluh	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan seluruh keperluan yang terkait dengan pelaksanaan penerapan PHT 2) Memandu pelaksanaan penerapan PHT 3) Membantu dinas kabupaten dalam melakukan survey penerapan PHT 4) Berkoordinasi dalam pelaksanaan penerapan PHT dengan dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan

Tabel 5 Lanjutan

No	Stakeholder	Peran dan kepentingan
		4) Berkoordinasi dalam pelaksanaan penerapan PHT dengan dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan
		5) Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penerapan PHT ke dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perkebunan
6.	Kelompoktani/Petani	1) Mengikuti sosialisasi penerapan PHT 2) Melakukan seluruh tahapan penerapan PHT
7.	KUD	1) Penyedia sarana produksi 2) Simpan pinjam 3) Pengumpul pucuk 4) Koordinasi dengan stakeholder lain

Sumber : data primer diolah (2017)



Gambar. Redesign struktur kelembagaan PHT kelompoktani dan stakeholder pada komoditas teh di Kabupaten Tasikmalaya

Keterangan : —> Perintah
 - - - - - Koordinasi

harian di wilayah kerjanya, memimpin operasional pengendalian OPT yang timbul akibat peledakan hama, melaksanakan bimbingan teknis peningkatan keterampilan petani dalam operasional pengendalian OPT, dan menginventarisir perawatan dan perbaikan terhadap sarana

pengendalian yang dimiliki BPT. Sementara peran dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten melalui para pemandu lapang dan petugas penyuluh pertanian yaitu melaksanakan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan analisa hasil pemantauan, pengamatan serta peramalan OPT

yang ditindak lanjuti dengan pengawasan terhadap penerapan PHT sebagai upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja pelaksana PHT dalam hal ini Brigade proteksi tanaman perkebunan.

Permasalahan klasik pada kelembagaan pertanian umumnya dan khususnya kelembagaan PHT teh di Kabupaten Tasikmalaya di sebabkan kurangnya komunikasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dari seluruh *stakeholder* terutama lembaga-lembaga pemerintah yang membidangi komoditi ini. Pada kelembagaan PHT teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya ini hal di atas pun terjadi sehingga dirancang suatu kegiatan PHT teh rakyat yang *holistic* dari para pemegang kebijakan yang di perkuat oleh anggaran pada masing masing lembaga, terutama pada dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan harus menganggarkan anggaran khusus pada kegiatan PHT teh rakyat ini, terutama untuk kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang selama ini tidak ada.

Pada tatanan operasional di rancang atau di *design* agar petani memperoleh sarana pertanian yang mudah dan murah, hal ini di akomodir dengan didirikannya koperasi sehingga peran koperasi bukan hanya sebagai lembaga keuangan semata tetapi lebih jauh menjadi lembaga yang ideal dalam mengakomodir kebutuhan petani teh. Hal lainnya dengan adanya koperasi maka posisi tawar petani terhadap pabrik/tengkulak sebagai pemburu rente akan meningkat dan imbasnya harga produk dari PHT teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya akan berbeda dengan produk non PHT.

Gambaran di atas dijadikan dasar analisis untuk lebih mempertajam *redesign* keberlanjutan kelembagaan PHT teh rakyat di Kabupaten

Tasikmalaya, karena dari hasil analisis eksisting bahwasannya fungsi kelembagaan PHT teh rakyat masih belum optimal. Setidaknya ada 3 hal utama kenapa konsep berkelanjutan ini penting (Fauzi 2004). Pertama, menyangkut alasan moral. Kewajiban moral tersebut adalah dengan menyamakan kesempatan untuk menikmati keberhasilan pembangunan antar generasi (dalam kasus ini dengan mengurangi ketergantungan impor agar penguatan swasembada bisa tercapai pada masa yang akan datang). Kedua, menyangkut ekologi, yaitu kegiatan ekonomi saat ini tidak mengarah pada hal yang mengancam fungsi ekologi (dalam kasus ini adanya internalisasi eksternalitas limbah, sehingga terjaganya kelestarian ekologi). Ketiga, menyangkut ekonomi, dalam konsep keberlanjutan dari sisi ekonomi dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi.

Secara umum dapat dikemukakan permasalahan utama yang dihadapi dalam penerapan teknologi PHT secara berkelanjutan: 1) Proses difusi teknologi PHT masih berjalan lambat atau bahkan stagnasi. Disisi lain, perubahan pengetahuan dan sikap petani dalam pengendalian hama penyakit sesuai paket teknologi PHT juga masih rendah; 2) Rendahnya penyebaran teknologi antara lain dengan terbatasnya pembinaan terutama pasca SLPHT. Kurangnya melibatkan aparat penyuluh pertanian, menyebabkan ketergantungan terhadap para pemandu SLPHT sangat tinggi; 3) Sikap dan persepsi yang kuat terhadap penggunaan pestisida kimiawi sebagai cara praktis dan ampuh dalam pengendalian hama penyakit. Kenyataan ini mempersulit mengubah persepsi kearah penggunaan pestisida secara bijaksana dan dalam pemasyarakatan penggunaan pestisida nabati; 4) Pengambilan keputusan terkait pengendalian

hama penyakit atau keputusan dalam hal budidaya cenderung bersifat individual, dan belum dilakukan secara kelompok terutama pasca pelatihan. Kelompok tani belum berfungsi dalam pengambilan keputusan pengendalian hama penyakit atau kegiatan budidaya lainnya; 5) Masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam membina petani dan melanjutkan program SLPHT dengan sumberdaya dari daerah. Mengingat kegiatan SLPHT dari pemerintah pusat sudah selesai; dan 6) Masih terbatasnya dukungan berbagai kelembagaan seperti pemasaran hasil, dan permodalan dalam membantu petani untuk lebih meningkatkan kinerja usahatannya (Abdurahman, 1998)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1) Hasil analisis menunjukkan kelembagaan PHT teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya merupakan kelembagaan yang melibatkan banyak pihak. Kelembagaan eksisting yang sudah terbentuk (*de facto*) dalam faktanya belum mampu menjalankan fungsinya dengan efektif. Kelembagaan yang sesuai dengan aturan main (*de jure*) tidak berjalan di lapangan. Dari hasil analisis tersebut berimplikasi pada pendapatan usaha tani teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya terutama dari segi harga pucuk teh yang tidak membedakan antara pucuk PHT dan Non PHT. Dari hasil pengamatan hal ini disebabkan oleh tidak mempunyai nilai tawar baik petani ataupun kelompok tani terhadap pengumpul atau tengkulak, dimana tengkulak ini merupakan salah satu *actor* penting dalam pembangunan teh rakyat, namun mereka

mempunyai tujuan yang berbeda dengan *stakeholder* lain yaitu sebagai pemburu keuntungan (*rent seeker*).

2) *Redesign* kelembagaan yang berkelanjutan yang dapat mengubah pola pikir seluruh *stakeholder* agar mempunyai visi yang sama dan harus dihormati oleh seluruh *stakeholder*, dan dibentuknya brigade proteksi tanaman sehingga mampu menjalankan kelembagaan yang baik, permasalahan lainnya yaitu koordinasi dan evaluasi yang disebabkan oleh tidak adanya anggaran, solusinya adalah menambahkan anggaran pada dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota.

Saran

1. Perlu ada keberlanjutan kegiatan penerapan PHT pada petani sebagai penguatan kelembagaan PHT, dengan melakukan penguatan monitoring dan evaluasi mulai dari pusat hingga daerah, selain itu perlu diefektifkan kembali program pendampingan untuk menjamin penerapan PHT di tingkat lapangan agar teknik budidaya yang dilakukan petani tercapai tingkat optimalisasi alokasi input dapat efisien baik secara teknis, alokatif maupun ekonomi guna meningkatkan produksi dan pendapatan petani, serta adanya penguatan pada setiap tingkat kelembagaan yang berhubungan dengan keberlanjutan tingkat penerapan PHT pada komoditas teh, mulai dari penyusun dan perencanaan, pelaksana, pendamping hingga pihak lain yang mendukung kegiatan PHT. Sehingga tercipta sinkronisasi dan integrasi baik dalam visi dan misi serta tercipta kesatuan langkah dan gerak demi menjamin tujuan utama dari penerapan prinsip PHT.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait pola pasar yang saling menguntungkan.

REFERENSI

- Asosiasi Teh Indonesia (ATI). 2000 Reformasi Sistem Pemasaran Teh untuk kelestarian Industri Teh Indonesia. Asosiasi Teh Indonesia.
- Baharsjah, 1994. *Arab dan Tantangan Pembangunan Pertanian*. Bogor. Cornelius, 2005. Analisis Data Statistik, Step By Step SPSS 13. Andi Offset, Yogyakarta.
- Darmawan, D. A. dkk. 1993 *Kajian Aspek Sosial Ekonomi Pengendalian Hama Terpadu*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. 2013. Statistik Perkebunan Jawa Barat
- Direktorat Jenderal Perkebunan, perkembangan luas areal teh di Indonesia pada kurun waktu 1980–2013.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. 2014. Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
- Dalim, 1990. *Pengaruh Faktor Kelembagaan Dalam Peningkatan Produktivitas Padi di Sumatera Barat*. Tesis. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- International Tea Committee (ITC). 2003. *Annual Bulletin of Statistics 2003*. International Trade Center.
- Leksono, Sonny. 2013. Penelitian Kualitatif. Ilmu Ekonomi, *Dari Metodologi ke Metode*. Jakarta (Id): Raja Grafindo Persada
- Soekartawi. 2003. *Teori Ekonomi Produksi, dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Douglass*. Cetakan Ketiga. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahyuti. 2003. *Bedah Konsep Kelembagaan. Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 123 hal
- Wasiati, 2003. *Evaluasi Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Padi (Oryza Sativa sp) di Kelompok tani Sari Asih Kabupaten Sukoharjo*.